SURAT KABAR UMUM
REKOMENDASI
Penyambung Aspirasi Rakyat
Edisi 18 : Senin, 12 September 2005 -25 September 2005

# PEMIMPIN NEGARA JANGAN HANYA LEBIH SIBUK DI KEGIATAN SEREMONIAL

Jakarta, Rekomendasi.- Pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia harus ditangani tanpa pandang bulu. Siapapun terlibat KKN perlu dilibas. Lebih dari itu, penegakan hukum jangan hanya sekedar dijadikan lip service. Karena jika ini yang terjadi, bukan tidak mungkin KKN bakal kian merajarelela dan rakyat pula yang akan menanggung akibatnya, rakyat miskin semakin bertambah.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) M. Julius Manurung belum lama ini kepada wartawan Rekomendasi di ruang kerjanya di gedung Dewan Pers jalan Kebon Sirih Jakarta, seraya menambahkan, penduduk miskin yang menurut hasil penelitian Departemen Pertanian sekitar 37,3 juta jiwa membutuhkan perhatian serius pemerintah, apalagi, 22 persen diantara jumlah penduduk miskin tersebut adalah kaum muda dengan usia 15-19 tahun.

"FKI-I Menghimbau para pemimpin bangsa dan negara ini untuk lebih memprioritaskan kebijakan-kebijakan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan seremonial yang hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok," tegas M. Julian Manurung yang juga salah seorang deklarator Gerakan relawan SBY yang dideklarasikan di gedung pers Jakarta Pusat pada tanggal 16 April 2004, sedangkan tentang Front Komunitas Indonesia satu (FKI-I), M. Julian Manurung menguraikan, bahwa FKI-I lebih mengedepankan aksi intelektualitas, bukan aksi massa, dan mendukung pemerintah yang syah hasill pilpres 2004, namun bukan individu-individunya.

"Yang kami dukung bukan pribadi-pribadinya tetaip pemerintah yang syah," ujarnya, M. Julian Manurung dengan mengungkapkan, FKI--1 yang merupakan embrio dari ( Gerakan Relawan SBY, telah berdiri di 23 Propinsi, 71 tingkat Kabupatgen dan 31 tingkat kota. Tujuan FKI-I yang dideklarasikan pada tanggal 19 Juuli 2004, berperan aktif mendorong akselerasi pembangunan nasional. Selalu membelela kehormatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia dari ancaman yang mungkin timbul, baik dalam maupun luar negeri dengan peran serta mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), paparnya.

Sedang tujuan lainnya, tegas Ketua Umum FKI-I melakukan fungsi control terhadap parlemen/legislative, eksekutif, yudikatif dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

M. Julian Manurung juga mengatakan, pada tanggal 7 September 2005 ini sudah melantik pengurus FKI-I Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan dimeriahkan pawai delman yang akan mengarak baliho foto SBY, Presiden Republik Indonesia serta pada awal September ini, FKI-I juga berencana menggelar seminar dengan thema Urgensi Reshufle Kabinet Indonesia bersatu, di Gedung Dewan Pers Jakarta. Dukungan agar SBY me-reshuffle tim ekonomi juga disampaikan ketua umum Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-I). M Julian Manurung. "Bagi kami reshuffle kabinet harus dilakukan, terutama di bidang ekonomi. Tapi harap dicatat hal ini jangan dibuat sebagai kuota politik seperti yang telah dilakukan SBY. Jika reshuffle tidak segera dilaksanakan, maka SBY tinggal tunggu waktunya saja, tegas Julian.

Lembaga yang pada pilpres 2004 lalu menjadi salah satu embrio utama pendukung SBY ini lama kelamaan gerah terhadap kinerja SBY yang tidak jelas arahnya dan cenderung sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok.

Dr. Muchtar Pakpahan bersama Julian manurung

"Kalau perlu SBY jangan malu-malu mengganti semua penggantinya dengan yang baru. Tapi dengan catatan, tidak mengakomodasi kepentingan partai lagi," tandasnya.

Julian juga meminta agar SBY tak takut pada ancaman partai politik tertentu yang mengancam kekuasaan SBY bila kadernya tak ditempatkan diKabinet. "Ada aturan mainnya dalam hal interpelasi yang diajukan DPR jika merasa tidak puas dengan kinerja presiden. Selama SBY berjalan dalam koridor yang benar maka saya yakin kejadiannya tidak bakal seperti saat ini. Rakyat juga sudah semakin paham dengan hal ini," ujarnya.

Keadaan ekonomi yang semakin parah dan ketidak jelasan arah kebijakan SBY dilihat FKI-I merupakan buah dari kelambanan SBY membuat kebijakan yang independent terhadap pembantu-pembantunya.

Julian bahkan berani menunjukan Menko Ekuin, Aburizal Bakrie menteri yang harus sesegera mungkin direshuffle oleh SBY akibat kinerjanya yang tidak becus dalam mengurus sector perekonomian. **(Wilson P/Jhonson S)**